

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa penyelenggara pemula mampu beradaptasi sebagai bagian integral penyelenggara Pilkada Serentak 2024 di Desa Plosorejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, melalui proses dialektis dinamis antara disposisi individu, akumulasi modal, dan kondisi objektif ranah, sesuai kerangka teori praktik Pierre Bourdieu: $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$. Habitus yang terbentuk dari pendidikan formal Administrasi Negara dan pengalaman organisasi kampus (seperti BEM) menjadi fondasi utama adaptasi awal dengan menyediakan modal kultural terstruktur. Di ranah desa yang relatif kondusif dan berfanatisme politik rendah, adaptasi jauh lebih didukung oleh mentoring informal PPK serta dukungan administratif-sosial sekretariat PPS dan jaringan RT/RW—yang terbukti lebih efektif dan kontekstual—dibandingkan bimtek formal KPU yang cenderung tekstual. Hambatan relasional dan teknis (ego antar penyelenggara, kerja kaku, kesulitan menjadi pemateri Pantarlih, serta tekanan waktu singkat) merupakan perjuangan inheren dalam ranah, namun berubah menjadi katalisator pembelajaran kolektif yang progresif karena karakter ranah yang aman. Adaptasi sosial, netralitas, dan profesionalitas dijaga melalui negosiasi dialektis antara habitus etis penyelenggara pemula dengan tuntutan ranah yang kental

jaringan kekerabatan, sehingga potensi kekerasan simbolik berhasil dinegasikan dengan mempertahankan modal simbolik sebagai penyelenggara netral dan rendah hati. Pengalaman ini tidak sekadar mereproduksi habitus lama, melainkan menghasilkan transformasi cara pandang yang mendalam terhadap demokrasi dan Pilkada, dari persepsi “pekerjaan mudah” menjadi pemahaman realistis tentang kompleksitas tugas, tanggung jawab publik, serta integritas proses demokrasi lokal. Secara keseluruhan, keberhasilan adaptasi dalam waktu relatif singkat merupakan hasil interaksi aktif dan strategis antara disposisi individu, akumulasi modal kultural-sosial-simbolik, serta kondisi ranah spesifik—bukan semata determinisme struktural. Temuan ini memperkuat relevansi teori Bourdieu dalam demokrasi lokal Indonesia sekaligus memberikan implikasi praktis bagi perbaikan bimtek dan mentoring informal penyelenggara pemula di Pilkada mendatang.

B. Saran

1. Bagi KPU dan BAWASLU

Bagi KPU dan Bawaslu, diperlukan upaya nyata untuk memperkuat mekanisme mentoring informal antara PPK dan PPS serta integrasi yang lebih erat dengan sekretariat desa sejak tahap awal pembentukan tim, karena bentuk dukungan ini terbukti jauh lebih efektif daripada bimtek formal yang cenderung bersifat tekstual dan kurang kontekstual. Selain itu, program bimtek perlu dirancang secara lebih kontekstual, simulatif, dan berbasis kasus lokal sehingga modal budaya yang disampaikan dapat langsung dikonversi menjadi praktik

yang fleksibel dan sesuai dengan realitas ranah desa. Pada saat yang sama, pemanfaatan modal sosial tokoh RT/RW juga harus dilakukan secara sistematis sebagai jembatan adaptasi sosial sekaligus sarana sosialisasi partisipasi masyarakat, mengingat struktur gotong royong dan kekerabatan masih menjadi elemen dominan dalam kehidupan desa.

2. Bagi Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

Bagi penyelenggara pemilu ad hoc, khususnya para penyelenggara pemula, diharapkan dapat secara aktif membangun dan memanfaatkan jaringan sosial lokal terutama dengan tokoh RT/RW, serta senantiasa menjaga sikap rendah hati dan netralitas sejak tahap awal pelaksanaan tugas. Lebih dari itu, mereka perlu terus mengembangkan kerendahan hati dalam menerima koreksi dan saran dari rekan senior maupun pihak terkait, disertai dengan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang muncul di ranah lokal, sehingga proses adaptasi tidak hanya berjalan efektif tetapi juga harmonis dan selaras dengan karakteristik masyarakat desa yang kental dengan nilai gotong royong dan kekerabatan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, studi mendatang dapat membandingkan proses adaptasi penyelenggara pemula di desa dengan karakteristik yang berbeda, misalnya di desa dengan tingkat fanatisme politik yang tinggi atau di daerah urban, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang variasi konteks ranah Pilkada. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan

pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas berbagai jenis modal baik modal budaya, sosial, maupun simbolik dalam proses adaptasi penyelenggara pemula. Lebih jauh lagi, kajian mendatang perlu mengeksplorasi secara lebih mendalam peran kekerasan simbolik dan strategi dominasi dalam ranah kepemiluan tingkat desa, agar dinamika kekuasaan, negosiasi, serta reproduksi dan transformasi habitus di tingkat lokal dapat dipahami secara lebih komprehensif.